

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2012/2013**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :
Muhamad Asrullani
B 200.110.117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2012/2013**

Yang di tulis oleh :

MUHAMAD ASRULLANI

NIM : B 200 110 117

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut memenuhi syarat untuk di terima.

Surakarta, 10 Februari 2016

Pembimbing



(Dr. Zulfikar, S.E, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Dr. Triyono, S.E. M.Si)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Pertumbuhan ekonomi (Growth), ukuran pemerintah (Size), pendapatan asli daerah (PAD), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), belanja modal (BM), kompleksitas transaksi (KT) dan jumlah penduduk (Population) terhadap kelemahan pengendalian intern (SPI).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 53 pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (Growth), Ukuran Pemerintah (Size), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Modal (BM), Kompleksitas Transaksi (KT) dan Jumlah Penduduk (Population) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengendalian Intern, pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja modal, kompleksitas transaksi, jumlah penduduk.

ABSTRACT

This research aimed at analyzing the influence of the factors of economic growth (Growth), government size (Size), local original revenue (PAD), regional task force (SKPD), capital expenditure (BM), complexity of the transactions (KT), and Population on the weakness of internal control (SPI).

This research used the technique of *purposive sampling*. Sample used was as many as 53 regional governments of regency/municipality that had complete data. The methods of analysis used in this research were test of descriptive statistics, classical assumption test and hypothesis testing.

The results of this research showed that the variables of economic growth (Growth), government size (Size), local original revenue (PAD), regional task force (SKPD), capital expenditure (BM), complexity of the transactions (KT), and Population did not have a significant influence on the weakness of internal control of the regional government.

Keywords: Internal Control, economic growth, government measure, local original revenue, capital expenditure, complexity of the transactions, population.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah (Martanti dan Zaelani, 2011). Implikasi dari adanya otonomi adalah kewajiban pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel.

Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan keuangan Negara berkaitan dengan: sistem penganggaran, struktur anggaran, peristilahan, pengukuran kinerja, konsep pusat-pusat pertanggungjawaban, desentralisasi, standar kebijakan akuntansi dan perubahan sistem akuntansi keuangan ke sistem ganda (*double entry*) dengan dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis akrual (*cash basis*

toward accrual). Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara/daerah untuk memperkecil potensi kecurangan. Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*Fraud*). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian intern dalam pemerintah daerah. Pengendalian intern dalam pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan intern yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya

manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Dalam penelitian Coe dan Curtis (1991) menemukan total 127 kasus kelemahan pengendalian intern di Carolina Utara AS sebagian besar (24%) terjadi di lembaga pemerintah. Menurut Abbot *et al.* Dalam Wilopo (2006) pengendalian intern yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan dalam organisasi. Hal ini senada dengan survey KMPG tahun 2006 dimana sebagian besar kecurangan (38%) terdeteksi karena adanya kelemahan pengendalian intern.

Dengan demikian pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, pendapatan asli

daerah, jumlah SKPD, belanja modal, kompleksitas transaksi, dan jumlah penduduk memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat pengendalian intern dalam pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2012/2013”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Variabel Dependen

a. Pengendalian Intern

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Penerapan pengendalian intern dalam setiap

kegiatan operasi perusahaan diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan misalnya penggelapan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

b. Tujuan Pengendalian Intern

Demi mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, lembaga atau organisasi wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern menurut PP No. 60 (2008), suatu perusahaan dapat mencapai tujuan pengendalian internalnya dengan menerapkan lima komponen:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Pengendalian Resiko

3) Prosedur Pengendalian Pemantauan Pengendalian

4) Sistem Informasi

d. Prosedur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002), terdapat beberapa prosedur pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

- 1) Karyawan yang kompeten, dapat diandalkan, dan etis.
- 2) Pemberian tanggung jawab
- 3) Pemisahan tugas
- 4) Audit
- 5) Dokumen
- 6) Perangkat elektronik
- 7) Pengendalian lainnya

e. Pemahaman Atas Pengendalian Intern

Penilaian atas SPI berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian atas SPI dilakukan untuk pihak yang mempunyai wewenang sebagai pengawas (inspektorat atau BPK) atau auditor (BPK) (Warren, 2004).

f. Kelemahan Pengendalian Intern

Menurut Warren (2004), kelemahan pengendalian intern tersebut didapatkan dengan melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Hipotesis

1. Pertumbuhan ekonomi (Growth) dengan kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis 1: Tingkat pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

2. Ukuran pemerintah daerah (Size) dengan kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis 2: Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis 3: Jumlah PAD memiliki pengaruh positif

terhadap kelemahan pengendalian intern.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis 4: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

5. Belanja Modal (BM) dengan kelemahan pengendalian intern.

Hipotesis 5: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

6. Kompleksitas Transaksi (KT) dengan Kelemahan Pengendalian Intern.

Hipotesis 6: Kompleksitas Transaksi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern

7. Jumlah Penduduk (Population) dengan Kelemahan Pengendalian Intern.

Hipotesis 7: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif hipotesis.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi se-indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan berdasarkan kriteria tertentu

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif mengenai Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Sumber data untuk dianalisis berasal dari data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-jawa tengah Tahun 2012/2013 yang telah diaudit BPK.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Terdapat dua uji yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-jawa tengah tahun 2012/2013. Sampel Pemerintah Daerah yang berhasil di peroleh dalam penelitian ini sebanyak 53 Pemerintah Daerah dengan total data 70 Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 dan 2013. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi (*Growt*), ukuran pemerintah (*Size*), Pendapatan

Asli Daerah (PAD), jumlah SKPD, belanja modal, kompleksitas transaksi dan jumlah penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-jawa tengah tahun 2012/2013.

Deskripsi Data

Variabel sistem pengendalian intern (SPI), pertumbuhan ekonomi (Growth) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar *error* dari variabel tersebut kecil (Ghozali, 2011).

Analisis data

Hasil Uji Asumsi klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,665 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk

model dalam penelitian ini memiliki data yang normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF kurang dari 10 dan hasil *tolerance* mendekati 0,1. Maka dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.6 tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda

Uji Statistik t

- variabel Population tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPI.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi

berganda diperoleh angka koefisien determinansi dengan $Adj-R^2$ sebesar 0,041. Hal ini berarti bahwa 4,1 % variasi variabel kelemahan pengendalian intern dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, satuan kerja perangkat daerah, belanja modal, kompleksitas transaksi dan jumlah penduduk sedangkan sisanya 95,9 % dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

bahwa nilai F hitung sebesar 1,317 dengan nilai sig. Sebesar 0,265. Nilai Signifikansi $> 0,05$ yang berarti bahwa adanya pengaruh tidak signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Growth) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H_1).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini kemungkinan karena gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah

memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga kecurangan dapat dikurangi. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swastika Nirmala dan Daljono (2012), Puspitasari Titus (2013) dan penelitian Hartono (2014) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah bisa mengatur atau manajemen pemerintah daerahnya agar mengurangi terjadinya masalah pengendalian intern. Selain itu, pemerintah daerah juga memperbaiki kualitas pengendalian internnya.

Pengaruh ukuran pemerintah daerah (Size) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H_2).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ge dan Mc Vay (2005) dan Doyle, Ge, dan Mc Vay (2007) dan Hartono (2014) yang menyatakan bahwa kelemahan pengendalian intern lebih banyak terjadi pada entitas kecil dikarenakan entitas yang kecil pengendalian internnya belum begitu memadai.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H_3).

Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Petrovits, Shakespears, dan Shih (2010) dan Hartono (2014) yang menyatakan bahwa sumber pendapatan membuat pengendalian intern meningkat.

Pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H₄).

Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh-skife, dan Kinney (2007) dan Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa jumlah kecamatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Alasan yang mendasari adalah pemerintah daerah yang memiliki satuan kerja yang banyak akan memiliki banyak diversifikasi sehingga akan menyebabkan semakin kompleksnya pengendalian intern yang dilakukan. Dengan demikian semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan SKPD yang berbeda.

Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H₅).

Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belanja modal ada tindakan penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Pengaruh Kompleksitas Transaksi (KT) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H₆).

Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki kompleksitas tinggi memiliki kelemahan pengendalian intern yang tinggi.

Pengaruh jumlah penduduk (Population) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (SPI) (H₇).

Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ge dan Mc Vay (2005), Doyle, Ge, dan Mc Vay (2007) dan Hartanto (2014) yang menyatakan bahwa penduduk yang banyak akan mengurangi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hal ini

dikarenakan pemerintah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak akan lebih dapat tekanan dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga akan mengurangi kelemahan pengendalian intern.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,861 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hasil ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swastika Nirmala dan Daljono (2012) Puspitasari Titus (2013) dan penelitian Hartono (2014) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah bisa mengatur atau manajemen pemerintah daerahnya agar mengurangi terjadinya masalah

pengendalian intern. Selain itu, pemerintah daerah juga memperbaiki kualitas pengendalian internnya.

2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,622 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ge dan Mc Vay (2005) dan Doyle, Ge, dan Mc Vay (2007) dan Hartono (2014) yang menyatakan bahwa kelemahan pengendalian intern lebih banyak terjadi pada entitas kecil dikarenakan entitas yang kecil pengendalian internnya belum begitu memadai.
3. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,979 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan

pengendalia intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, Shakespears, dan Shih (2010) dan Hartono (2014) yang menyatakan bahwa sumber pendapatan membuat pengendalian intern meningkat.

4. Satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,032 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak satuan kerja perangkat daerah maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalia intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh-skife, dan Kinney (2007) dan Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan SKPD yang berbeda.
5. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,032 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar belanja modal maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalia intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belanja modal adanya tindakan penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
6. Kompleksitas transaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,232 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompleksitas transaksi maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalia intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) dan Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki kompleksitas tinggi memiliki kelemahan pengendalian intern yang tinggi.
7. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan

pengendalian intern dengan nilai signifikansi $0,241 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka tidak begitu mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ge dan Mc Vay (2005), Doyle, Ge, dan Mc Vay (2007) dan Hartanto (2014) dikarenakan pemerintah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak akan lebih dapat tekanan dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga akan mengurangi kelemahan pengendalian intern.

Saran

Penelitian mengenai pengendalian intern pemerintah daerah di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini:

1. Pada penelitian selanjutnya dengan fokus yang serupa seyogyanya dapat menambah cakupan jumlah tahun pengamatan dan lingkup penelitian diperluas.
2. Menambah variabel independen lain yang dianggap berpengaruh

terhadap kelemahan pengendalian intern demi mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, Daniel W. Dan Kinney, William R. 2006. *The Discovery and Reporting Of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated Audits*. McCombs Research Paper Series No. ACC-02-05.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://www.bpk.go.id>
- Coe, Charles, Ellis dan Curtis. (1991). Internal Controls in State, Local, and Nonprofit Agencies. *Public Budgeting & Finance. Malden: Vol. 11, Iss. 3; pg. 43* .
- Kristanto, Septian Bayu (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1*
- Martani dan Zaelani (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *Pemerintah daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*.
- Saggaf. (1999). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan ekonomi di Kotamadya, Pekanbaru. *Tesis*. Medan.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods For Business*. United States: Willey
- Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Zhang, Niu dan Zheng. (2009). Research on the determinants of the quality of internal control: evidence from China. *International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering Paper*.